

UNSUR-UNSUR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Julia Rizki Nurulhuda¹⁾, Sandrayati²⁾, Nurhasanah³⁾

^{1,2,3)} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

^{*2)} Corresponding author: sandradewasaputra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kualitas aparatur pemerintah daerah, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan sampel jenuh dengan menyebarkan 57 kuesioner kepada pegawai BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja pada Sekretariat dan bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis. Teknik analisis yang digunakan adalah alat analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Sistem Pelaporan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Sistem Pelaporan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: *Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

Abstract

This study aims to determine the effect of clarity of budget targets, quality of local government apparatus, and reporting system on accountability of government agency performance at the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province. The data collection technique used by the saturated sample was distributing 57 questionnaires to BAPPEDA employees of South Sumatra Province who work in the secretariat and in the fields of control, evaluation, and strategic planning. The analysis technique used is a multiple linear regression analysis tool with SPSS version 26. Based on the results of the study, the results partially show that Clarity of Budget Targets, Quality of Local Government Apparatus, and Reporting System have a positive and significant influence on the Accountability of Performance of Government Agencies in BAPPEDA of South Sumatra Province, while simultaneously showing that Clarity of Budget Targets, Quality of Local Government Apparatus, and Reporting System have a positive and significant influence on Performance Accountability Government Agencies at BAPPEDA South Sumatra Province.

Keywords: *Clarity of Budget Targets, Quality of Local Government Apparatus, Reporting System, and Performance Accountability Government Agencies*

1. PENDAHULUAN

Tercapainya tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas adalah keinginan setiap organisasi sektor publik. Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik ini, sistem pertanggungjawaban yang memadai dan terukur harus dikembangkan dan dilaksanakan sehingga pengelolaan pemerintahan dan

pengelolaan pembangunan dapat berlangsung secara efisien, efektif, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dibuat untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Pada peraturan ini, diwajibkan setiap instansi pemerintah untuk memberikan laporan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Ranwal Renstra BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 diketahui bahwa setiap tahunnya anggaran pelaksanaan program mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh tunjangan kinerja pegawai yang hanya dibayarkan 6 bulan dari 12 yang dianggarkan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi penurunan pada tahun 2022 yaitu pada beberapa kegiatan dalam pelaksanaan 3 (tiga) program pada BAPPEDA Provinsi Sumatera selatan dilakukan secara daring sebagai antisipasi penyebaran dampak covid 19 yang pada tahun sebelumnya beberapa kegiatan tersebut dibatasi pelaksanaannya dengan cara rasionalisasi dan refocusing anggaran.

Dalam penyusunan anggaran, anggaran harus menjelaskan tujuannya. Rencana kinerja tahunan yang jelas digunakan untuk mengukur kinerja yang dapat menjadi tolak ukur setiap organisasi publik. Indikator kinerja digunakan pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Pratama, dkk (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah instansi pemerintah.

Berdasarkan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 terdapat kelemahan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yaitu belum terlaksananya peningkatan atas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Komposisi pegawai masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran. Selain itu dalam hal penempatan pegawai, diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya.

Sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting bagi setiap instansi pemerintah. Jika dalam instansi tersebut tidak terdapat sumber daya manusia, organisasi tidak dapat mencapai tujuannya dan berkembang. Hasil penelitian Azizah & Widyawati (2020) menyatakan bahwa kualitas sumber daya

manusia berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan LKJiP BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, akuntabilitas BAPPEDA Provinsi Sumatera untuk tahun 2022 mendapatkan predikat AA (Sangat Memuaskan). Pelaporan kinerja BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 12,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaporan kinerja untuk tahun 2022 masih belum optimal dikarenakan masih belum mencapai target pelaporan kinerja yang diinginkan yaitu sebesar 15%.

Sistem pelaporan merupakan gambaran kewajiban untuk melaporkan kinerja atas setiap aktivitas dan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan memantau dan mengawasi kinerja manajer dalam memenuhi anggaran. Informasi yang berkaitan dengan keputusan ekonomi, sosial dan politik yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan harus diberikan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan Aprilianti, dkk (2020) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kualitas sumber daya manusia dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan temuan penelitian ini dapat bermanfaat untuk instansi khususnya bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja mengacu pada kewajiban suatu instansi pemerintah untuk bertanggungjawab atas hasil dari keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan yang telah diberikan kepada stakeholders untuk mencapai misi organisasi yang diukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah diterapkan dan dilaporkan secara berkala.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas pada organisasi sektor publik harus memenuhi empat kriteria, antara lain:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (accountability for probity and legality);
Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan memastikan bahwa hukum dan peraturan lain dipatuhi saat menggunakan dana publik.
2. Akuntabilitas Proses (process accountability);
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dalam memenuhi standar sistem informasi akuntansi, manajemen dan administrasi. Akuntabilitas proses ditunjukkan dengan penyediaan layanan publik yang cepat, responsif dan murah.
3. Akuntabilitas Program (program accountability);
Akuntabilitas program berkaitan dengan apakah tujuan telah dicapai dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil terbaik dengan biaya yang paling rendah.
4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability).
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, atas kebijakan yang dibuat terhadap DPR/DPRD dan public secara keseluruhan

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa jauh tujuan dengan menetapkan suatu anggaran secara jelas dan spesifik yang bertujuan agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya (Bastian, 2010).

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia pada pemerintah daerah adalah aparatur sipil negara. Kualitas sumber daya manusia adalah individu yang memiliki bekal pendidikan, latihan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang diberikan (Priansa, 2017).

Sistem Pelaporan

Menurut Pratama dkk (2019) menyatakan bahwa sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawah kepada atasan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa atribut-atribut kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diimplementasikan dalam informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuannya. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi keempat kriteria untuk memenuhi kualitas yang diinginkan, antara lain:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan Aprilianti dkk, (2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hayani & Julita (2021) yang menyatakan bahwa kejelasan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H1: Diduga kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.

Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penelitian Azizah & Widyawati (2020) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Fadila, (2019) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H2: Diduga kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan Pratama, dkk (2019) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. hasil ini sejalan dengan penelitian Dewata, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H3: Diduga sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan secara parsial.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

H4: Diduga kejelasan sasaran anggaran, kualitas aparatur pemerintah daerah, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menginvestigasi pada populasi atau sampel yang spesifik, pengumpulan data menggunakan alat ukur penelitian analisis data yang dilakukan secara statistik, dengan maksud untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

Objek Penelitian

Penelitian ini ditunjukkan kepada pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan selama Maret-Juni 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di bagian sekretariat dan bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis (PEPS) sejumlah 57

pegawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer melalui metode pengumpulan kuesioner yang berisi pernyataan atau pertanyaan tertulis yang akan diberikan kepada responden untuk diisi. Sampel responden dikirim secara langsung ke kantor BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan untuk mengisi kuesioner tersebut.

Definisi Operasional

Variabel independen pada penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2), Sistem Pelaporan (X3) sedangkan untuk variabel dependen adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Hasil dari kuesioner yang disebar dan dikumpulkan akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan aplikasi Statistical Program and Services Solution (SPSS) versi 26.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error		
(Constant)	.458	4.017	.114	.910
Kejelasan Sasaran Anggaran	.245	.105	2.338	.023
Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	.351	.163	2.154	.036
Sistem Pelaporan	.484	.153	3.160	.003

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 1 menunjukkan model persamaan regresi linier berganda. Berikut persamaan regresi linier berganda:

$$Y = 0,458 + 0,245 X_1 + 0,351 X_2 + 0,458 X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda menyatakan bahwa:

1. Konstanta sebesar 0,458 menjelaskan bahwa jika nilai variabel kejelasan sasaran anggaran, kualitas aparatur pemerintah daerah, dan sistem pelaporan bernilai 0 maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bernilai positif yaitu 0,458.
2. Nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran 0,245. Hal ini menunjukkan jika nilai kejelasan sasaran anggaran naik sebesar 1% maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan naik sebesar 24,5%.
3. Nilai koefisien regresi variabel kualitas aparatur pemerintah daerah 0,351. Hal ini menunjukkan jika nilai kualitas aparatur pemerintah daerah naik sebesar 1% maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan naik sebesar 35,1%.
4. Nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan 0,458. Hal ini menunjukkan jika nilai sistem pelaporan naik sebesar 1% maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan naik sebesar 45,8%.

Hasil pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary			
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.722 ^a	.521	.493	4.16635

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,493. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, kualitas aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi adalah 49,3%, sedangkan 0,507 atau 50,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model ini.

Hasil uji parsial pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Uji Parsial (uji-t)

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
(Constant)	.114	.910
Kejelasan Sasaran Anggaran	2.338	.023
Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	2.154	.036
Sistem Pelaporan	3.160	.003

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji pada tabel 3 di atas, diketahui bahwa nilai t-hitung kejelasan sasaran anggaran sebesar 2,338 jika dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 2,007, artinya nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel. Nilai signifikan kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,023 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan juga signifikan.

Nilai t-hitung kualitas aparatur pemerintah daerah sebesar 2,154 jika dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 2,007, artinya nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel. Nilai signifikan kualitas aparatur pemerintah daerah sebesar 0,036 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan juga signifikan.

Nilai t-hitung sistem pelaporan sebesar 3,160 jika dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 2,007, artinya nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel. Nilai signifikan sistem pelaporan sebesar 0,003 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan juga signifikan.

Hasil uji simultan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a		
	F	Sig.
Regression	18.469	.000 ^b
Residual		
Total		

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji pada tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 18,469 lebih besar jika dibandingkan dengan F-tabel sebesar 2,79 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak atau H4 diterima. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai t-hitung sebesar $2,338 > t\text{-tabel}$ sebesar $2,007$ dengan nilai signifikan sebesar $0,023 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Dapat dikatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain, semakin jelas sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat, dan sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran rendah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun. Arah penggunaan anggaran pemerintah harus dinyatakan secara jelas sehingga penyimpangan anggaran dapat dihindari.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Handayani, dkk (2022) yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. penelitian yang dilakukan oleh Hayani & Julita (2021) juga menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian variabel kualitas aparatur pemerintah daerah menunjukkan nilai t-hitung sebesar $2,154 > t\text{-tabel}$ sebesar $2,007$ dengan nilai signifikan sebesar $0,036 < 0,05$, sehingga H2 diterima. Dapat dikatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dengan kata lain, semakin baik kualitas aparatur pemerintah daerah yang dimiliki maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga meningkat. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, harus dapat dipastikan bahwa sumber daya yang digunakan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Jika kualitas aparatur pemerintah daerah yang dimiliki rendah dapat mempersulit proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi sektor publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitra, dkk (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Fadila, dkk (2019) juga menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian variabel sistem pelaporan menunjukkan nilai t-hitung sebesar $3,160 > t\text{-tabel}$ sebesar $2,007$ dengan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$, sehingga H3 diterima. Dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka semakin baik sistem pelaporan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Sistem pelaporan yang baik juga harus dibuat secara rutin dan disajikan secara lengkap karena sistem pelaporan dapat digunakan sebagai gambaran pertanggungjawaban bawahan kepada atasan sehingga dapat memudahkan dalam menggambarkan tingkat pencapaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratama, dkk (2019) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil Penelitian Dewata, dkk (2020) juga menyatakan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji simultan menunjukkan nilai F-hitung sebesar $18,469 > F\text{-tabel}$ sebesar $2,79$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kualitas aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kualitas aparatur pemerintah daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
3. Sistem Pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi khususnya BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan harus meningkatkan lagi kejelasan sasaran anggaran, kualitas aparatur pemerintah daerah dan sistem pelaporan dengan mengikuti peraturan yang berlaku agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat ditingkatkan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel yang akan digunakan, menggunakan variabel-variabel lain yang berpengaruh seperti pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi, penekanan anggaran atau menambahkan variabel moderating dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu penelitian yang akan dilakukan diharapkan menggunakan metode lain dalam pengumpulan data seperti melalui wawancara secara langsung atau menggunakan objek yang berbeda.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- Azizah, N. A., & Widyawati, D. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–20.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik : suatu pengantar (S. Suryadi, Ed.; 3 ed.). Erlangga.
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 541–550.
- Fadila, R. J., Lestari, R., & Nurleli. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru). 5(1), 103–108.
- Handayani, F., Hartati, S., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian TPH. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 4(2), 126–136.
- Hayani, S., & Julita, J. (2021). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Studi pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 2(1), 78–93. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.78-93>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.85>
- Priansa, D. J. (2017). *Perencanaan & Pengembangan SDM*. Alfabeta.
- Safitri, F., Sari, K. R., & Aryanti, Y. A. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(7), 1116–1133.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Andi.